

# Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan

Adam Wira Sanjaya<sup>1,\*</sup>, Muhammad Heru Akhmadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

<sup>1</sup> [adamwiras7@gmail.com](mailto:adamwiras7@gmail.com) \*; <sup>2</sup> [heru.cio@gmail.com](mailto:heru.cio@gmail.com)

\* corresponding author

Adam Wira Sanjaya

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 25-09-2021

Revised : 04-07-2022

Accepted : 05-07-2022

### Keywords

Effectiveness

Poverty

Sosial assistance

Basic Food Program

## ABSTRACT

*Poverty in Indonesia continues to increase, especially since the COVID-19 pandemic. So that it becomes a problem that needs to be solved by the Indonesian government, one of which is with the social assistance of the Basic Food Program. Social assistance programs are programs where local governments provide financial assistance to communities that are not sustainable. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Basic Food Program in alleviating poverty in Medan Belawan District. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used primary and secondary data through in-depth interviews and documentation studies, then document analysis. The sample selection used purposive sampling technique so that several informants were obtained, namely: Medan City Social Service, Regional Coordinator of the Basic Food Program, District Social Workers, E-Warong, Head of Environmental Groups and Beneficiary Families. The results of this study reveal that the implementation of the Basic Food Program is still not effective based on the indicators used, namely resource approach, process approach, and goals approach. Although the Basic Food Program provides convenience for Beneficiary Families, there are still many things that need to be improved to make it more optimal and effective.*

## PENDAHULUAN

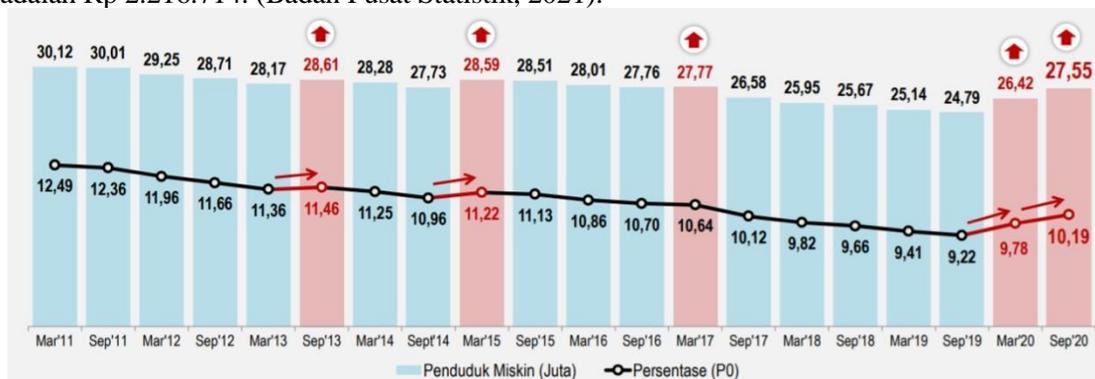
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Ada banyak teknik untuk mengurangi kemiskinan tergantung pada jumlah orang yang masih miskin dan karakteristik kemiskinan (Damayanti, 2021). Biasanya, kantong-kantong kemiskinan cenderung terkonsentrasi di tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau.

Pemerintah Republik Indonesia masih harus segera menangani masalah kemiskinan tersebut. Seluruh kementerian ikut berperan untuk meningkatkan inisiatif pengurangan kemiskinan terutama Kementerian Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mewajibkan Kementerian Sosial di Indonesia untuk bertanggung jawab atas upaya penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan seluruh potensi lokal dan sumber perlindungan sosial, sebagai salah satu dari sekian banyak kementerian/lembaga pemerintah (Hernawati, 2020).

Pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) baru di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Dirjen Penanggulangan Miskin, merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Menyusul dibentuknya Direktorat Penanggulangan Penduduk Miskin di Pulau Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Batas Antar Negara Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penduduk Miskin Melalui Pendekatan Regional Pendekatan Regional departemen telah dibuat. (Winarno, 2020).



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), ada peningkatan kemiskinan sebanyak 0,41 persen dibandingkan dengan Maret 2020 dan peningkatan sebesar 0,98 persen dari September 2019. 27,55 juta diberikan. Pada September 2020, tingkat kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 458.947 per kapita per bulan, dengan Garis Kemiskinan Makanan menyumbang 73,87 persen dari total dan Garis Kemiskinan Non-Makanan menyumbang 119.943. (26,13 persen). Sebuah keluarga miskin Indonesia memiliki rata-rata 4,83 orang pada September 2020. Dengan demikian, garis kemiskinan rata-rata bulanan per rumah tangga miskin adalah Rp 2.216.714. (Badan Pusat Statistik, 2021).



**Gambar 1.** Kemiskinan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila dilihat di level daerah, kemiskinan belum juga teratasi, salah satunya wilayah provinsi Sumatera Utara. Data Badan Pusat Statistika Sumatera Utara (2021) menyatakan bahwa dari 33 kota dan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Utara, Medan masih menjadi kota yang memiliki masyarakat miskin terbanyak diantara kota/kabupaten lainnya. Dari jumlah masyarakat miskin di Kota Medan, kecamatan Medan Belawan memiliki persentase kemiskinan yang tertinggi diantara kecamatan lainnya.

**Tabel 1.** Jumlah Persentase Kemiskinan Fakir Miskin di Kota Medan Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Kemiskinan
	(Jiwa)	
Medan Baru	40.963	3%
Medan Petisah	63.992	4%
Medan Polonia	57.501	5%
Medan Maimun	41.092	8%
Medan Area	99.993	4%
Medan Barat	73.424	5%
Medan Kota	75.153	5%
Medan Tuntungan	87.939	5%
Medan Timur	112.482	5%
Medan Selayang	109.926	5%
Medan Sunggal	117.189	5%
Medan Perjuangan	96.848	6%
Medan Amplas	129.323	4%
Medan Helvetia	153.989	4%
Medan Tembung	138.884	5%
Medan Johor	136.069	5%
Medan Denai	147.981	5%
Medan Deli	188.807	5%
Medan Labuhan	120.861	10%
Medan Marelan	172.456	7%
Medan Belawan	99.273	15%
<b>Medan</b>	<b>2.264.145</b>	<b>6%</b>

Sumber: Diolah dari Dinas Sosial Kota Medan

Berbagai program dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah (khususnya Kementerian Sosial RI) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menerima bantuan sosial. Program Perlindungan Sosial diantaranya Program Keluarga Harapan, program Bantuan Sosial Pangan (Bansos) untuk keluarga miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta Program Pangan Sembako yang baru diluncurkan pada Desember tahun 2020. (Hermawati, 2020). Program Sembako dilakukan agar tepat sasaran, kuantitas, waktu, harga, kualitas dan administrasi terpenuhi yang dikembangkan awalnya adalah BPNT (Bantuan Program Pangan Non-Tunai). Seperti BPNT, Program Sembako seharusnya memberdayakan penerima manfaat untuk memutuskan jenis, kualitas, harga dan di mana membeli makanan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Sebelumnya program bantuan sosial telah bertransformasi berulang kali, pada awalnya adalah Program Operasi Pasar Khusus (OPK), setelah dinilai kurang efektif kemudian bertransformasi menjadi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), karena masih banyak penyalahgunaan dan belum tepat sasaran maka bertransformasi lagi menjadi Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, beras diganti dengan uang keringanan yang langsung ditransfer ke rekening KPM. Untuk menerima telur dan beras, uang tunai harus ditukar di agen yang ditunjuk. Program ini berganti nama menjadi Program Sembako pada tahun 2020.

## LANDASAN TEORI

### Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu cara untuk mengukur bagaimana kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas kegiatan bisa diketahui dengan cara perbandingan tujuan kegiatan menggunakan output dan outcome kegiatan (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 pada Satries, 2011).

Keberhasilan kegiatan pada sebuah organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas yaitu telah tercapainya kegiatan tersebut baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu dan lain sebagainya. Namun, masih banyak terdapat perbedaan ukuran efektivitas yang digunakan para pakar. Sebab utama perbedaan tersebut adalah bahwa ukuran efektivitas yang bisa digunakan dan belum ada kesepakatan bersama dari para pakar untuk mendefinisikan ukuran efektivitas.

Menurut Martani dan Lubis (1987), ada tiga teknik dasar untuk mengevaluasi efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) digunakan untuk menilai efektivitas kontribusi. Keberhasilan organisasi diprioritaskan dalam rangka mengamankan sumber daya fisik dan non fisik yang akan memenuhi semua tuntutan organisasi.
- b. Pendekatan berorientasi proses (*process approach*) digunakan untuk mengevaluasi kemandirian semua kegiatan internal atau proses organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) yaitu sebagai hasil dari strategi ini (pendekatan tujuan), hasil diukur sesuai dengan rencana baik itu *output* maupun *outcome*.

### Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hambatan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, masyarakat, atau bahkan suatu negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, mengancam posisi tawar (*bargaining stance*) dalam urusan internasional, menghancurkan generasi, dan meramalkan masa depan yang suram bagi bangsa dan negara. Kemiskinan dikatakan terkait akan ketidaknyamanan dalam hidup, menyiratkan bahwa keberadaan orang miskin biasanya selalu dan sering kali tidak nyaman. Mereka selalu terpinggirkan di segala bidang karena tidak bisa mengkorelasikan situasi mereka dengan situasi masyarakat sekitar (Suwandi, 2015). Kemiskinan juga mengacu pada kurangnya kepemilikan dan pendapatan yang buruk, atau lebih khusus, keadaan di mana kebutuhan dasar manusia seperti makanan, perumahan, dan pakaian tidak terpenuhi. Keadaan ini dijelaskan oleh beberapa definisi, salah satunya menurut Habibullah (2019), kehidupan hidup yang buruk atau ketidakcukupan materi pada individu atau kelompok individu digambarkan sebagai kemiskinan. Chambers dalam Homsan (2015) mendefinisikan kemiskinan memiliki lima dimensi: 1) kemiskinan; 2) kurangnya kekuatan; 3) ketidakstabilan dalam menghadapi keadaan darurat; 4) ketergantungan; dan 5) isolasi. Secara geografis dan sosial, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai, perlakuan hukum yang tidak adil, dan ancaman kriminal

adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan selain uang dan tingkat pendapatan (Habibullah, 2019).

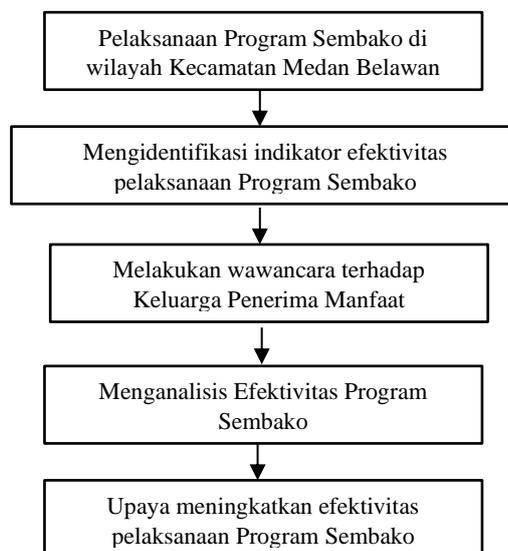
### Program Sembako

Program Sembako adalah bantuan pangan setiap bulan, pemerintah memberikan bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli makanan di warung elektronik (e-warung). Tujuan program sembako untuk memperluas bantuan pangan non tunai dengan meningkatkan nilai bantuan dan keragaman pangan yang tersedia. Penggunaan uang elektronik dan/atau tabungan pada Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat digunakan sebagai media pemberian bantuan sosial dimungkinkan melalui penyelenggaraan Program Sembako. Meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan jaminan sosial kepada rumah tangga berpendapatan rendah merupakan tujuan pemerintah. (Apriyani, 2018).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Objek penelitian yang alami digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan triangulasi, analisisnya kualitatif atau induktif, dan makna generalisasi diprioritaskan dalam hasil penelitian. Bentuk penelitian kualitatif ini didasarkan pada filosofi postpositivisme. Data deskriptif didefinisikan oleh Sugiyono (2013) sebagai data deskriptif yang diperoleh dari perilaku yang diamati dari individu-individu di sekitarnya. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode: wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis dokumen. Penulis memutuskan untuk menggunakan teknik ini adalah karena dengan adanya survei ke lapangan langsung, data yang diperoleh bisa menjadi lebih valid pada detailnya dan memperkuat hipotesis yang telah dibuat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan berada pada kota Medan, Provinsi Sumatera Utara merupakan kecamatan yang memiliki masyarakat miskin terbanyak di kota Medan dan Peneliti melakukan penelitian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada Bulan Juni-Juli terhitung sejak tanggal persetujuan izin penelitian. Orang-orang yang terlibat langsung dengan Program Sembako di Kabupaten Medan Belawan dianggap sebagai informan penelitian. Selanjutnya, sesuai dengan topik penelitian, informan dipilih secara bijaksana dan kemudian diperkenalkan kepada orang lain sampai kejenuhan tercapai (Patton, 2014). Pendekatan *purposive* membebaskan peneliti dari keterikatan formal ketika mengumpulkan sampel penelitian, memungkinkan mereka untuk memilih sampel berdasarkan fokus dan tujuan penelitian.

Informan-informan tersebut terdiri dari: Dinas Sosial Kota Medan, Koordinator Daerah Program Sembako, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), E-Warung, Ketua Kelompok Lingkungan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh data dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Medan Belawan

Salah satu daerah yang melaksanakan program ini adalah Kota Medan dengan 92 titik utama E-Warong yang tersebar diseluruh wilayah Kelurahan Kota Medan. E-Warong adalah seseorang atau agen bank atau pedagang dan/atau pihak lain yang telah ditentukan sebagai tempat pembelian barang sembako oleh Kementerian Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat.

Kota Medan memiliki 21 Kecamatan yang setiap kecamatannya memiliki jumlah E-Warong yang berbeda-beda. Kementerian Sosial menyampaikan bahwa daerah yang masyarakat miskinnya banyak tinggi harus memiliki banyak E-Warong, karena E-Warong digunakan untuk mempermudah masyarakat miskin membeli sembako agar mereka bisa bertahan hidup. Kecamatan Medan Belawan memiliki 12 E-Warong yang terletak pada 6 Kelurahan Medan Belawan yang melayani 8228 Keluarga Penerima Manfaat.

**Tabel 2.** Jumlah E-Warong Kota Medan

No.	Kecamatan	Jumlah E-Warong
1	Medan Petisah	1
2	Medan Maimun	1
3	Medan Baru	2
4	Medan Kota	2
5	Medan Barat	2
6	Medan Helvetia	2
7	Medan Sunggal	2
8	Medan Perjuangan	3
9	Medan Polonia	3
10	Medan Selayang	3
11	Medan Johor	4
12	Medan Area	4
13	Medan Tembung	5
14	Medan Timur	5
15	Medan Tuntungan	5
16	Medan Amplas	5
17	Medan Denai	6
18	Medan Labuhan	7
19	Medan Marelan	9
20	Medan Deli	9
21	Medan Belawan	12
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan

Pemberian bantuan berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari atau sembako warga Medan Belawan menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin. Pemerintah senantiasa memperbaiki program bantuan sosial dari waktu ke waktu. Pembaharuan program dilengkapi dengan fasilitas tambahan serta peningkatan besaran indeks bantuan.

**Tabel 3.** Jumlah E-Warong Kelurahan Medan Belawan

Kecamatan	Jumlah E-Warong	Jumlah KPM
Kelurahan Belawan I	2	1743
Kelurahan Belawan II	2	1308
Kelurahan Belawan Bahagia	2	1326
Kelurahan Belawan Bahari	2	1069
Kelurahan Belawan Sicanang	2	1355
Kelurahan Bagan Deli	2	1427
<b>Jumlah Total</b>		<b>8228</b>

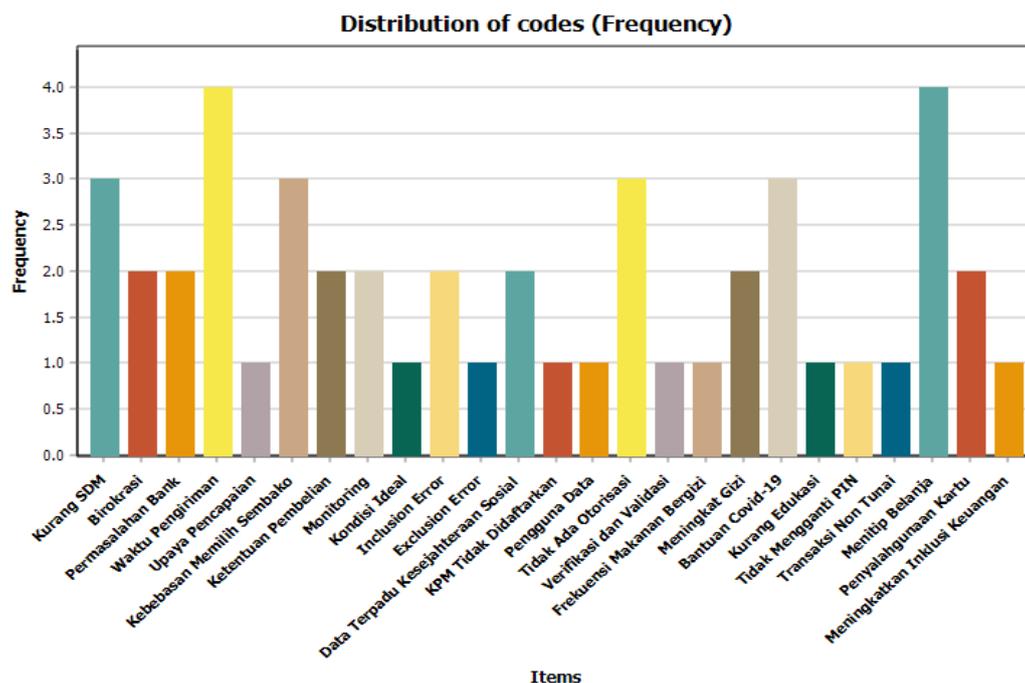
Sumber: Dinas Sosial Kota Medan

Mulai bulan Maret 2020, indeks bantuan sembako menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Kenaikan Program sembako ini diharapkan mampu memberikan pondasi bagi masyarakat miskin untuk dapat bangkit dan mengurangi sedikit beban KPM yang terlanda dampak COVID-19. Walaupun jumlah yang diberikan tidak begitu banyak, namun diharapkan sekali mampu memberikan manfaat pada masyarakat. Pemerintah juga mengharapkan bantuan-bantuan ini mampu merealisasikan perbaikan sosial didalam masyarakat dan dan mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri sebagai sebuah organisasi yang saling berhubungan.

### Indikator Efektivitas Program Sembako

Untuk mampu menyatakan keberhasilan dari program yang dilaksanakan maka perlu adanya analisis mengenai efektivitas dari Program Sembako yang dilakukan. Dalam pengukurannya lantas dibutuhkan sebuah indikator, indikator berguna untuk menentukan sejauh mana program ini dapat dikatakan efektif. Dalam penelitian ini telah diwawancarai 5 informan yang berkaitan langsung dengan Program Sembako di Medan Belawan untuk mencari tahu indikator apa saja yang harus terpenuhi agar program ini dapat dikatakan efektif.

Hasil wawancara terhadap 5 informan tersebut dianalisis menggunakan aplikasi *QDA Miner Lite*. Sehingga diketahui bahwa indikator yang bisa digunakan untuk menganalisis keefektifan Program Sembako Medan Belawan sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan 1-5 adalah Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) tercermin dalam Birokrasi dan Kualitas Pelaksana Kegiatan (Aparatur). Pendekatan Berorientasi Proses (*Process Approach*), terwujud dari Ketepatan Waktu Proses Penyaluran dan Ketersediaan Sembako. Serta Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*) yang direalisasikan melalui Ketepatan Sasaran dan *Outcome*.

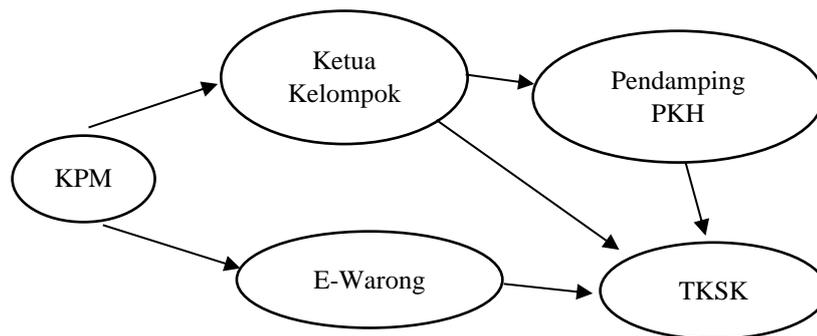


**Gambar 3.** *Distribution of codes* berdasarkan data hasil wawancara  
Sumber: Olah data aplikasi *QDA Miner Lite*

Sesuai dengan rancangan dari Bank Indonesia mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014, maka Program Sembako ini menjadi sebuah program yang memiliki tujuan untuk mampu memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai penggunaan non tunai pada kalangan ekonomi menengah kebawah. Tujuan utama pemerintah dalam instruksi meningkatkan inklusi keuangan salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Maka atas instruksi ini kemudian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dimintai keterangan terkait perbankan dan pembayaran non tunai.

### Efektivitas Program Sembako

Dalam setiap program yang dibuat harus ada tolak ukur efektivitasnya. Hal ini dilakukan untuk mampu menentukan apakah sasaran dan tujuan pelaksanaan bantuan yang dilakukan sudah sesuai dengan rancangan utama yang ditentukan. Karena efektivitas program berkaitan dengan sejauh mana sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan segala tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan yang berada pada kota Medan, Provinsi Sumatera Utara kepada beberapa informan dan subjek penelitian untuk memperoleh hasil penelitian. Ditemukan bahwa pada Birokasi pelaksanaannya, kenyataan di lapangan, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami masalah dalam proses penerimaan bantuan sembako. Pada saat KPM mendapat masalah, konsultasi yang dilakukan KPM berjenjang mulai dari melapor pada E-Warong atau melaporkan pada ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), lalu Pendamping PKH, hingga ke Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).



**Gambar 4.** Alur Laporan Permasalahan Program Sembako

Melalui bantuan dan kegiatan sosial ini kemudian akan terbentuk sebuah hubungan antara masyarakat antara pemerintah. Hubungan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara aspirasi-aspirasi masyarakat. Selain itu melalui hal ini pula pemerintah mampu memberikan atau menyampaikan rancangan pemerintahan dan kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga mampu dipahami dengan masyarakat. Humas yang baik memberikan sebuah harmonisasi antara dua organisasi yang bergerak demi mampu merealisasikan tujuan bersama yang telah dibangun.

Hambatan lainnya adalah tidak seperti Pendamping PKH pada program PKH, pada Program Sembako TKSK tidak memiliki otorisasi untuk membuat calon KPM dapat menerima program bantuan atau memutuskan bantuan terhadap KPM yang dinilai sudah tidak membutuhkan bantuan lagi, TKSK hanya bisa membuat laporan dan menurut keterangan TKSK laporan tersebut tidak langsung berhasil, harus menunggu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berikutnya. Sehingga keberadaan TKSK pada masyarakat tidak begitu digubris karena dinilai tidak memiliki *power*. TKSK juga mengalami kesulitan untuk melayani seluruh KPM pada satu kecamatan. Banyak laporan-laporan yang terbengkalai karena TKSK kewalahan menghadapi banyak permasalahan dan harus diselesaikan dengan seorang diri. Dapat terlihat disini bahwa program sembako masih membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang lebih agar dalam pelaksanaannya setiap keluhan dan laporan permasalahan dari KPM dapat segera diatasi.

Penyaluran dana juga kerap kali terlambat. Padahal penyaluran dana program sembako seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang berjalan. Jika melebihi dari tanggal 10 awal bulan maka penyaluran tersebut dikatakan terlambat. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dan harus melakukan alokasi kebutuhan. Dari analisa tersebut maka pada indikator Birokrasi dan Kualitas Pelaksana Kegiatan (Aparatur) pada Program Sembako dinilai masih belum efektif. Saat dana program sembako sudah disalurkan, KPM akan berkumpul untuk membeli sembako di E-Warong. Perkumpulan yang terjadi dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19 yang lebih cepat. Pembayaran sekaligus di awal maupun di akhir merupakan langkah yang dilakukan untuk mengurangi kerumunan yang terjadi di E-Warong. Permasalahan yang terjadi adalah KPM tidak menerima informasi bahwa pembayaran akan diterima sekaligus.

Sesuai dengan ketentuan awal dari tujuan diadakannya bantuan Sembako ini dimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu melalui pemberian pangan yang bergizi maka perlu sekali sepertinya membahas efektivitas dari ketersediaan bahan-bahan pangan yang ada pada e-warong yang disediakan. Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako, KPM dapat memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan yang ingin dibeli menggunakan dana bantuan program Sembako. KPM berhak memilih makanan yang memiliki kandungan sumber protein, vitamin, karbohidrat dan mineral. Pilihan KPM adalah bahan pangan lokal seperti jagung atau beras, kemudian ada daging-dagingan dan telur dari bagian protein hewani, kacang-kacangan termasuk tempe tahu dalam protein nabati, serta buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. KPM tidak boleh membeli produk pangan seperti tepung, minyak gula, susu pabrikan, makanan kaleng dan instan seperti mie. Dana bantuan juga tidak diperkenankan untuk membeli rokok dan pulsa sebagai bentuk kebutuhan tersier. Karena program ini tujuannya adalah sebagai pemenuhan bahan pangan lokal dan inti. Namun pada hasil wawancara dan analisa lain ditemukan bahwa E-warong setempat menyediakan berbagai macam bahan pangan yang sesuai dengan sistem perpaket-paket, namun yang disayangkan dari masyarakat adalah mereka terkadang tidak dapat menukarkan barang pangan yang mereka perlukan karena sistem pembagian bahan pangan adalah paket.

Jika KPM diberikan kebebasan untuk memilih sembako, maka harus ada pilihan E-Warong lain yang dapat dijangkau oleh KPM. Jika tidak, KPM akan kesulitan mencari sembako yang sesuai kebutuhannya pada satu E-Warong karena keterbatasan pilihan. Saat ini Medan Belawan hanya memiliki 2 E-Warong di setiap kelurahan. Tentu saja, 2 E-Warong sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan satu kelurahan. Dan untuk menjangkau E-Warong yang lain KPM memerlukan transportasi yang mana akan menambah beban bagi KPM. Maka dari itu, sistem paket adalah solusi yang diberikan E-Warong untuk menjamin KPM menerima sembako sesuai dengan komponen bahan pangan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini kemudian menyatakan bahwa pelaksanaan Bantuan program sembako belum efektif. Jika KPM diberikan kebebasan untuk memilih sembako, maka harus ada pilihan E-Warong lain yang dapat dijangkau oleh KPM. Jika tidak, KPM akan kesulitan mencari sembako yang sesuai kebutuhannya pada satu E-Warong karena keterbatasan pilihan. Saat ini Medan Belawan hanya memiliki 2 E-Warong di setiap kelurahan. Tentu saja, 2 E-Warong sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan satu kelurahan. Dan untuk menjangkau E-Warong yang lain KPM memerlukan transportasi yang mana akan menambah beban bagi KPM. Maka dari itu, sistem paket adalah solusi yang diberikan E-Warong untuk menjamin KPM menerima sembako sesuai dengan komponen bahan pangan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka efektivitas dari indikator ketersediaan sembako sesuai dengan tujuan program yaitu kebebasan KPM untuk memilih bahan pangan masih belum efektif. Karena KPM menerima sembako paket yang diberikan oleh E-Warong dan KPM kesulitan mencari pilihan E-Warong yang lain karena keterbatasan jumlah dan jarak E-Warong.

Masalah utama dalam setiap program bantuan adalah ketepatan sasaran. Apakah masyarakat yang menerima bantuan memang layak menerima bantuan atau tidak. Tentu saja pemerintah harus memiliki standar untuk mengukur masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Akan tetapi, pengukuran tersebut sangat sulit dilakukan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan agar bantuan sembako menjadi tepat sasaran sesuai dengan *by name by address*. Tetapi kenyataannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak sefleksibel dan sedinamis perekonomian keluarga. Budiani (2007) menyatakan variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Tetapi hal yang terpenting adalah variabel tepat sasaran. Masyarakat yang dinilai sebagai sasaran penerima bantuan ini adalah Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial 25% paling rendah di daerah pelaksanaan program, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan program yang telah dilakukan mulai 2017 kemudian menyatakan kelompok keluarga ini sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Indikator tepat sasaran diharapkan mampu menjawab apakah masih adanya kesalahan dalam penerima program ini atau tidak, yang dapat dilihat dari *Exclusion Error* merupakan mengenai masyarakat yang seharusnya memperoleh namun tidak terdaftar pada data, dan *Inclusion Error* adalah data yang menyatakan mengenai masyarakat yang seharusnya tidak memperoleh bantuan justru memperoleh bantuan.

Selain itu juga Salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia adalah mengenai membangun sebuah perbaikan gizi dan penurunan stunting yang mampu mempengaruhi status kesehatan gizi secara menyeluruh dimana jika kemudian berlanjut mampu memberikan pengaruh signifikan pula pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Penurunan kualitas SDM ini mampu

menciptakan sebuah daya saing yang rendah. Maka dari itu Kementerian Kesehatan menitipkan uang sebesar Rp40.000,- kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Sembako, agar KPM dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pangan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dimintai keterangan terkait frekuensi mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein, karbohidrat, vitamin maupun mineral.

*Outcome* merupakan pedoman dalam pencapaian program untuk mengukur efektivitas program. *Outcome* program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah *outcome* yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Agar dinilai efektif, maka *output* dari program ini harus langsung dan tepat kepada sasaran penerimaan manfaat. Akurasi penerima bantuan harus selalu diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan target sasaran program sembako. Karena kerap kali, masyarakat bersifat egois dan mementingkan diri sendiri di tengah situasi buruk seperti ini. Jika terdapat keluarga yang layak menerima bantuan program sembako, maka keluarga tersebut harus pendaftaran mandiri DTKS Kementerian Sosial. Langkah awalnya adalah keluarga tersebut mendaftar ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Lalu pada tingkat Desa/Kelurahan akan dilakukan musyawarah untuk menentukan apakah keluarga tersebut dapat dimasukan kedalam DTKS. Setelah itu Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data dengan mengunjungi rumah keluarga tersebut. Lalu hasil verifikasi dan validasi di input ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan akan dilaporkan kepada kepada Bupati/Walikota untuk ditandatangani lalu disampaikan kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Sosial.

Menurut Duncan dalam Steers (1985 : 32) mengatakan ukuran efektivitas adalah pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan merupakan ukuran kunci dari semuanya, kita dapat mengabaikan semuanya jika tujuan yang kita dapatkan sesuai dengan rencananya. Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako tujuan program ini dalam jangka panjang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan serta meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Selaras dengan itu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang menguntungkan pada inisiatif pengurangan kemiskinan. Ditinjau dari Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif, disebutkan bahwa inklusi keuangan merupakan sebuah keadaan yang mana setiap warga dalam masyarakat memperoleh akses untuk membagi layanan keuangan yang berkualitas dan formal, lancar, tepat waktu dan aman tentu dengan biaya penanganan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Program ini belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan negara beberapa alasan diantaranya adalah akibat: banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akun Bank. Hampir tidak ada, KPM yang memiliki akun bank (*unbanked*) pada institusi keuangan formal dan KPM masih memunculkan rasa malas sehingga kerap kali menitipkan belanjanya ke orang lain. Walaupun KPM sudah diberikan sosialisasi dan edukasi terkait kerahasiaan PIN, ternyata masih ada KPM yang menitip belanja kepada orang lain.

### **Upaya Peningkatan Program Sembako**

Setelah mendapatkan informasi yang kompleks terkait dengan permasalahan dan kekurangan pelaksanaan program sembako di Medan Belawan, maka harus ada upaya untuk melakukan perubahan dan peningkatan agar senantiasa menjadi lebih baik di kemudian hari. Masing-masing indikator memiliki upaya tersendiri agar dapat lebih efektif.

Bagi Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Kota Medan harus membuat aturan yang jelas terkait dengan alur laporan yang harus dibuat masyarakat ketika mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi bisa beraneka ragam, mulai dari saldo kuota yang tidak bertambah, kehilangan kartu, KPM meninggal dunia hingga pengaduan masyarakat yang berhak mendapat sembako dan yang tidak berhak. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kepada siapa masyarakat harus melapor, apakah RT, RW, TKSK, Koordinator Daerah atau dinas sosial.

Pemerintah harus bisa memastikan Bank Penyalur melakukan transfer kepada kartu KPM sesuai dengan tanggal yang sudah direncanakan setiap bulannya. Dan dengan adanya Pandemi Covid-19 KPM lebih mengharapkan bantuan yang mereka terima tepat pada waktunya. Usaha pemerintah untuk melakukan pembayaran sekaligus baik di awal maupun di akhir untuk menghindari kerumunan harus dikaji kembali, karena tidak semua KPM yang menerima program sembako memiliki tempat penyimpanan yang layak untuk

membuat sembako tetap segar untuk dikonsumsi. Pemerintah bisa menggunakan sistem sembako keliling, yang mana meminta E-Warong dibantu oleh RT/RW setempat untuk memfasilitasi kendaraan dan fasilitas lainnya untuk melakukan jualan keliling sembari melihat masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini.

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hak mereka sebagai warga negara untuk mampu hidup baik dan layak dalam lingkup sosial yang ada. Subsidi bantuan yang diberikan juga cukup besar untuk mencukupi kebutuhan pangan KPM perbulannya, dan KPM memilih bahan makanan yang ingin dibeli selama masih sesuai dengan arahan dari pemerintah. Pemerintah harus mengkaji kembali terkait dengan kebijakan bahwa KPM dapat memilih bahan makanannya sendiri dan menentukan E-Warong mereka sendiri. Karena di lapangan, E-Warong yang tersedia tidak banyak jumlahnya dan tidak dapat mencukupi semua keinginan KPM serta banyak masyarakat yang belum siap menggunakan kartu sebagai alat pembayaran. E-Warong juga tidak dapat mencukupi semua keinginan KPM sehingga sistem paket yang dilakukan oleh kebanyakan E-Warong sebenarnya cukup efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Hanya saja memang, mungkin ada beberapa sembako yang tidak sesuai dengan selera KPM dan mengurangi tujuan dari inklusi keuangan, karena menganggap Kartu KKS sebagai kupon saja yang setiap bulan ditukar dengan paket sembako. Tetapi, dengan sistem ini pemilik E-Warong lebih mudah dalam melakukan pencatatan, karena pemilik E-Warong tidak perlu mencatat satu persatu jenis sembako yang dibeli oleh KPM, karena semuanya sama.

Permasalahan lain juga datang dari beberapa masyarakat yang tidak memperoleh bantuan secara merata sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Ada banyak bantuan yang meleset dan justru diterima oleh masyarakat yang ada pada golongan mampu. Ini menjadi gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan program ini masih memiliki beberapa rongga permasalahan yang mungkin dapat melebar dan semakin membesar jika tidak ditangani dengan serius. Ketidaktepatan sasaran program sembako ini juga dipengaruhi oleh sistem kontrol dari masyarakat yang enggan melapor ketika melihat bantuan sembako tidak tepat sasaran. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan banyak faktor, mulai dari tidak ingin menimbulkan perpecahan antar tetangga hingga laporan yang tidak direspon oleh pelaksana program. Selain itu, alasan lain dari masyarakat adalah tidak ada indikator yang jelas untuk menentukan siapa yang menerima program sembako ini. Karena jika menggunakan indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh BPS maka hampir tidak ada yang mendapatkan program sembako di wilayah perkotaan. Sasaran program ini bukan hanya masyarakat yang miskin tetapi keluarga yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial dibawah 25% di daerah pelaksanaan program.

Seharusnya dalam hal menentukan penerima manfaat sembako, alangkah baiknya jika Koordinator Daerah diberikan otorisasi langsung untuk menambahkan atau menghapus data KPM pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Informasi yang diterima oleh koordinator daerah mengenai KPM berasal dari usulan RT/RW dan harus ditinjau langsung oleh Koordinator Daerah. RT/RW harus bertanggung jawab terhadap nama KPM yang diusulkannya. Cara ini akan dapat memangkas waktu dalam penerimaan KPM yang baru. Sehingga ketika KPM baru diajukan, maka bulan depan KPM tersebut bisa mendapatkan bantuan sembako.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai, Informasi operasi penggunaan mesin penarikan, pergantian dan kerahasiaan PIN kartu KKS harus dapat diinformasikan oleh pengelola E-Warong. Sehingga kesannya, seluruh lembaga dalam penelitian ini mampu bekerjasama dengan baik demi mewujudkan tujuan utama dilaksanakannya Program. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pihak E-Warong selaku penyedia fasilitas, masyarakat KPM dan pemerintah pusat menjadi sebuah kesatuan yang penting.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan yang berada pada kota Medan, Provinsi Sumatera Utara kepada beberapa informan dan subjek penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 1) pelaksanaan Program Sembako dinilai masih belum efektif; 2) ketidaktahuan dan ketidakjelasan aturan terkait cara pelaporan dan klaim masih cenderung berbelit; 3) pemberian bantuan kurang tepat waktu penyaluran; 4) E-Warong Medan Belawan masih banyak menggunakan sistem paket sehingga KPM tidak dapat memilih yang diinginkannya; 5) ketidaktepatan sasaran bantuan yang diterima masih kerap terjadi; dan 6) tujuan untuk menaikkan inklusi keuangan pada Keluarga Penerima Manfaat masih belum tercapai, maka pengentasan kemiskinan belum tercapai seutuhnya.

Program Sembako ini telah dirasa memberikan kemudahan yang luar biasa bagi Keluarga Penerima Manfaat, namun perlu ada banyak sekali evaluasi dan perbaikan-perbaikan pada indikator yang ada sehingga proses bantuan sosial ini mampu berjalan lebih optimal dan efektif kedepannya dalam pengentasan angka kemiskinan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Damayanthi, I. A. S., Supriyanti, N. W., & Wismayanti, K. W. D. (2021) Implementasi Program Bedah Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Klungkung (Studi Kasus Di Desa Selat, Kecamatan Klungkung). Vol 1 No 01 : Ilmu Administrasi Negara.
- Gustin, G. (2019). Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 376-397.
- Hermawati, I., & Winarno, E. Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia *Beneficiary Family Perceptions On The Poverty Alleviation Programs In Indonesia*.
- Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari.1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah
- Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, B., Agustian, A., & Pangan, B. K. (2019). Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).
- Sitanggang, B. (2014). *Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zega, E. L. C. (2020). Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 secara Berkeadilan Di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.